

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pemikiran Muhammad Hatta Tentang Ekonomi Kerakyatan

Perhatian terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi dicurahkan oleh Bung Hatta. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi kerakyatan. Maka yang perlu dilakukan adalah mengubah struktur ekonomi umumnya dari ekonomi kolonial atau semacamnya ke ekonomi nasional yang berkerakyatan, ia mencoba mempraktekan pemikirannya itu pada koperasi, sebagai mana telah ada dan terbukti hingga sekarang ini.¹²⁶

¹²⁵Mubyarto, *membanqun sistem ekonomi* (Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI, 2000), 49.

78

Ekonomi kerakyatan dimaknai sebagai suatu sistem perekonomian di mana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi semua anggota masyarakat, sementara penyelenggara kegiatan-kegiatan ekonomi itu pun berada di bawah pengendalian atau pengawasan anggota-anggota masyarakat. Ekonomi kerakyatan secara harfiah, di lahirkan oleh ahli-ahli ekonomi indonesia sebagai usaha untuk menggali potensi ekonomi rakyat indonesia melalui sistem ekonomi alternatif yang sebenarnya sudah di jalankan oleh rakyat. Secara praktek, ekonomi kerakyatan sudah dijalankan oleh rakyat sebelum istilah ekonomi kerakyatan itu sendiri lahir.

[illegible]

Memang secara ekonomi bagi penguasa sangat dirasakan adanya sebuah kesejahteraan ekonomi akan tetapi semua itu hanya bisa dirasakan oleh segelintir orang saja. Yang terjadi di kalangan kaum proletar/rakyat sungguh jauh dari kesejahteraan. Semua itu dilandasi oleh berbagai kelemahan yang di akibatkan oleh sebuah sistem yang hanya mementingkan persoalan individu dan kelompoknya saja bahkan melalui cara-cara yang sama sekali tidak mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan.

Menurut Prof. sarbini didalam bukunya “Politik Ekonomi Kerakyatan” Kelemahan yang paling menonjol adalah tidak adanya kebebasan, demokrasi, dan yang paling lemah adalah tidak adanya keadilan dan pemerataan.¹²⁸ Disini terbukti bahwa akhirnya keadilan dan pemerataan adalah masalah yang paling fundamental di dalam membawa

128 Prof. Dr. Mulyarto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDI* (Pogayakarta: Aditya Media, 1999), 13.
 Prof. Sarbini Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 85.

Hatta mengemukakan keadaan struktur sosial- ekonomi pada zaman kolonial belanda di indonesia menunjukkan bahwa golongan rakyat pribumi yang mayoritas menempati stratum terbawah dalam sosial-ekonomi. Ekonomi rakyat dimana massa pribumi menggantungkan hidup mereka berada dalam posisi tertekan sebagai stratum terbawah dalam

[illegible]

Berdasarkan penggalan kalimat tersebut maka makna Ekonomi Kerakyatan atau demokrasi ekonomi dapat dipahami dengan mudah. Ekonomi Kerakyatan merupakan suatu situasi perekonomian dimana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi semua anggota masyarakat, sementara penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ekonomi itupun berada dibawah pengendalian atau pengawasan anggota-anggota masyarakat. Bila dikaitkan dengan bunyi pasal 33 ayat 1 UUD 1945 tadi, maka situasi perekonomian itulah yang disebut sebagai perekonomian usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹³²

Berdasarkan bunyi penggalan kalimat dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 itu, dapat diketahui secara substansial ekonomi kerakyatan sesungguhnya mencakup tiga hal berikut:

¹³¹Muhammad Hatta, *Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan* (Jakarta: UI Press, 1992), 17.

¹³² Srituan Arief, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerjasama Dengan IDEA, 1997), 3.

Dengan cara demikian seluruh masyarakat mendapat bagian dari hasil produksi nasional itu. Sebab itu, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 27 UUD 1945 , “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Kedua, adanya partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan, tidak boleh ada satu orangpun yang tidak ikut menikmati hasil produksi nasional, termasuk fakir miskin dan anak terlantar. Hal itu dipertegas oleh Pasal 34 UUD 1945 yang mengatakan, “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

[illegible]

Tetapi bila ditelusuri lebih jauh kebelakang, perbincangan mengenai keduanya ternyata sama sekali bukan merupakan produk baru bagi Indonesia, sebab gagasan dan perbincangan mengenai kedua hal itu sudah muncul dan dimulai sebelum bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.¹³⁶

Berdasarkan perbedaan persepsi di atas, untuk mengetahui keberadaan tentang kedua konsep tersebut, secara spesifik Bung Hatta ditengah-tengah dampak buruk ekonomi dunia yang melanda Indonesia saat itu, menulis sebuah artikel dengan judul “Ekonomi Rakyat”¹³⁷ dalam surat kabar Daulat Rakyat yang diterbitkan pada tanggal 20 November tahun 1933.¹³⁸

Dibandingkan dengan ekonomi penjajah yang berada di lapisan tengah, ekonomi rakyat Indonesia ketika itu sangat jauh memprihatinkan dan tertinggal. Sedemikian mendalam kekusaran Bung Hatta, maka pada

¹³⁶ Revrisond Baswir, "Sistem Ekonomi Kerakyatan", dalam ST. Sularto (ed), *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi (Menyambut 70 tahun Jacob Oetama)*, (Jakarta : Buku Kompas, 2001), 182.

¹³⁷ Bung Hatta pada intinya mengungkapkan kekusarannya menyaksikan kemerosotan perekonomian Rakyat Indonesia dibawah tindasan pemerintah Hindia Belanda. Sehingga yang dimaksud dengan ekonomi rakyat dan perekonomian rakyat itu tentu tidak lain adalah ekonomi pribumi atau penduduk asli Indonesia.

[illegible]

tahun 1934 ia kembali menulis sebuah artikel dengan nada serupa, judulnya kali ini adalah “Ekonomi Rakyat Dalam Bahaya”.¹³⁹

Salim Siagaan seiring dengan Bung Hatta mengungkapkan bahwa, ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi rakyat banyak di suatu negara atau daerah yang pada umumnya tertinggal bila dibandingkan dengan perekonomian negara atau daerah bersangkutan secara rata-rata.¹⁴⁰

Maka yang dimaksud dengan ekonomi rakyat adalah perekonomian atau perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang berkembang relative lambat, sesuai dengan kondisi yang melekat pada kelompok masyarakat tersebut. Sedang sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat kedalam proses pembangunan.¹⁴¹

Maka sehubungan dengan itu, Prof. Dr. Mubyato juga menjelaskan bahwa paling tidak ada lima agenda pokok ekonomi kerakyatan atau agenda demokrasi penguasaan faktor-faktor produksi, diantaranya sebagai berikut ;

- 1) Roda kegiatan ekonomi rakyat digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral.
- 2) Ada tekad kuat dari seluruh warga bangsa untuk mewujudkan pemerataan sosial.
- 3) Nasionalisme ekonomi.

¹³⁹ Sritua Arief, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia*(Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia), 62.

¹⁴⁰ Ibid., 52

¹⁴¹ Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat (Persepsi tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat)*, 9.

Dengan demikian, ekonomi kerakyatan berlandaskan pada sistem perekonomian yang berkeadilan, mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dan berlaku adil bagi seluruh rakyat. Sehingga tujuan akhir yang hendak ingin dicapai dan dicita-citakan Bung Hatta dalam sistem ekonomi secara menyeluruh atau mayoritas warga masyarakat dapat tercapai. Dengan diterapkannya sistem ekonomi kerakyatan, yaitu yang demokratis dan benar-benar sesuai dengan sistem nilai bangsa Indonesia (sistem ekonomi atau aturan main yang disepakati bersama) tentunya membuat peluang bahwa aturan main itu lebih sesuai dan lebih tepat bagi bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

[illegible]

Mengenai masalah demokrasi ini. Hatta sendiri sering mengistilahkan demokrasi dengan kedaulatan rakyat. Istilah kedaulatan rakyat ini sendiri diciptakan oleh hatta. Sebelum hatta mencetuskannya, belum dikenal istilah kedaulatan rakyat, yang dalam bahasa Belanda disebut *volkssouvereiniteit*.¹⁴⁴ Penggunaan istilah kedaulatan rakyat oleh Hatta ini, bisa kita lihat dalam tulisannya :

*“pada waktu yang akhir ini seringkali orang salah mengartikan “kedaulatan rakyat”, sebab itu ada baiknya kalau saya disini berkata sepatah-kata tentang kedaulatan rakyat itu. Kedaulatan rakyat artinya kekuasaan yang dijalankan oleh rakyat dengan secara mufakat. Kata mufakat mestilah ada, barulah kedaulatan itu ada pada rakyat. Putusan yang diambil oleh seseorang atau satu golongan saja dengan tiada persetujuan rakyat, bukanlah kedaulatan rakyat. Demikian juga kata mufakat yang dipaksakan kepada rakyat”.*¹⁴⁵

Kedaulatan rakyat atau istilah demokrasi yang dipahami Hatta bukanlah demokrasi yang dipraktikan negara-negara barat. Hatta menganalisis bahwa revolusi prancis tahun 1789, yang terkenal sebagai sumber demokrasi barat menyatakan bahwa trilogy *la liberte. l'Egalite et la Fraternite* (kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan) yang menjadi semboyannya tidak terlaksana didalam praktik. Karena menurut Hatta revolusi prancis meletus sebagai *revolusi individual* untuk memerdekakan orang-seorang dari ikatan feodalisme. Yang mana kemerdekaan individu

¹⁴⁵ Muhammad Hatta, *Kumpulan Pidato I* (Jakarta:PT. Toko Gunung Agung, 2002), 63-64.

Revolusi prancis yang tujuannya hendak melaksanakan cita-cita sama rasa hanya dipraktikan dalam politik. Dalam politik hak seseorang sama dengan yang lainnya : kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota dewan perwakilan rakyat. Tetapi lebih dari itu tidak persamaan. Dalam perekonomian tetap berlaku dasar tidak sama. Tidak ada demokrasi dalam ekonomi, karena telah digilas sama sekali oleh semboyan *laissez fair*, *laissez aller* : merdeka berbuat, merdeka bersaing.¹⁴⁷ Malah dengan semangat individual yang dihidupkan oleh revolusi prancis, kapitalisme semakin tumbuh subur pertentangan kelas sosial bertambah hebat. Penindasan yang lemah ekonominya oleh yang kuat bertambah kejam. Pertentangan yang hebat antara berbagai kepentingan, dimana ada golongan yang menindas dan yang tertindas. Oleh karena itu dalam demokrasi yang semacam itu, menurut Hatta sangat sukar persaudaraan didalamnya.¹⁴⁸

Namun walaupun Hatta menolak demokrasi versi barat, bukan berarti Hatta menerima “demokrasi rakyat” versi negara komunis, Uni Soviet. Karena menurutnya demokrasi rakyat versi komunis bukanlah sebuah demokrasi. Menurut Hatta, demokrasi membawa penghargaan

¹⁴⁶ Muhammad Hatta, *Muhammad Hatta Bicara Marxis* (Jakarta Timur: MELIBAS (Media Lintas Batas), 2001), 54.

¹⁴⁷ Muhammad Hatta, *Kumpulan Pidato II*, 97.

¹⁴⁸ Muhammad Hatta, *Karya Lengkap Bung Hatta Jilid 1* (Jakarta Selatan: LP3ES, 1998), 392.

kepada manusia dan persamaan antara merdeka, hal inilah yang tidak ada dalam sistem komunis. Sistem pemerintahan komusisme itu pada dasarnya tidaklain dari pada feodalisme yang dirasionalisasi.¹⁴⁹

Lalu dalam tulisannya didaulat Ra'jat pada tahun 1932, Hatta juga menambahkan penilaiannya mengenai demokrasi barat, bahwa demokrasi yang dilahirkan oleh revolusi prancis tidak memberi kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme. Sebab itu demokrasi politik saja tidak cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya, yaitu kedaulatan rakyat, dimana rakyat raja dalam menentukan nasibnya sendiri. Untuk mencapai kedaulatan rakyat, dibutuhkan juga demokrasi yang lain yaitu demokrsi ekonomi, yang memakai dasar “segala penghasilan yang mengenai penghidupan orang banyak harus berlaku dibawah tanggungan orang banyak pula”.¹⁵⁰ Pemikiran Hatta mengenai demokrasi ekonomi inilah yang pada akhirnya menjadi cikal bakal pasal 33 UUD 1945. Dengan adanya demokrasi ekonomi barulah bisa terjamin adanya keadilan sosial yang menghendaki kemakmuran yang merata keseluruh rakyat.¹⁵¹

Keadilan sosial yang menjadi tujuan dari penerapan demokrasi ekonomi di Indonesia, menurut Hatta, diinspirasi oleh tiga hal yaitu *pertama*, paham sosialisme barat yang dibawa oleh Karl Marx, yang menarik perhatian barat karena dasar-dasar perikemanusiaan yang

¹⁴⁹ Muhammad Hatta, *Demokrasi Kita. Bebas Aktif*, 180.

¹⁵⁰ Muhammad Hatta, *Kumpulan Karangan I* (Jakarta: Balai Buku Indonesia, 1953), 111..

¹⁵¹ Muhammad Hatta, Kumpulan Pidato II, 160.

Kedua, ajaran Islam, yang menuntut kebenaran dan keadilan illahi dalam masyarakat serta persaudaraan manusia sebagai makhluk tuhan, sesuai dengan sifat Allah yang maha pengasih dan penyayang. Tuntutan sosial dan humanisme dari ajaran sosialis itu lengkap pula oleh jiwa islam. menurut ajaran islam, bumi dan langit, pendek kata, alam seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Tidak sebagian pun dari semuanya itu adanya kepunyaan manusia. Allah menjadikan bumi ini semata-mata untuk kediaman manusia, dan oleh sebab itu manusia yang mempunyai kewajiban memelihara bumi ini sebaik-baiknya dan meninggalkannya

¹⁵⁴ Muhammad Hatta, *Kumpulan Pidato II*, 96.

Ketiga, pengetahuan bahwa masyarakat Indonesia berdasarkan kolektivisme. Semangat kolektivisme tersebut terlihat dalam masyarakat asli Indonesia yang melaksanakan pekerjaan yang berat-berat, yang tidak terpikul oleh orang-seorang, seperti menggarap sawah, memotong padi, membuat rumah, mengantar mayat ke kubur, membuat pengairan dan lain-lain, semua pekerjaan itu dilakukan bersama-sama secara gotong-royong. Gotong-royong bukan saja dilakukan dalam melakukan pekerjaan yang umum, namun juga dilakukan oleh pekerjaan yang menyangkut kepentingan pribadi seperti membangun rumah, dilakukan bersama dengan semangat tolong menolong dalam masyarakat desa yang asli, orang tidak menganal sistem upahan. Tidak saja berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, tetapi sedih sama derita dan gembira sama dirasa. Selamatan yang sering diadakan didesa dengan berganti tempat adalah suatu manifestasi dari pada semangat kolektif tadi.¹⁵⁶

Demokrasi ekonomi yang bertujuan menciptakan keadilan sosial, tampak jelas sangat mempengaruhi pemikiran-pemikiran Hatta dalam bidang ekonomi, baik pemikiran ekonomi yang bersifat mikro maupun makro. Dan dalam demokrasi ekonomi ini juga menjadi landasan dari pemikiran Hatta dalam masalah pembangunan ekonomi secara nasional.

¹⁵⁵ Ibid., 102.

¹⁵⁶ Muhammad Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia* (Jakarta: Penerbit Djembatan, 1963), 17.

Kedua, pembangunan yang besar-besaran dikerjakan oleh pemerintah atau dipercayakan pada badan-badan hukum yang tertentu dibawah penguasaan atau pengawasan pemerintah. Pedoman bagi segala usaha tersebut ialah mencapai “sebenarnya kemakmuran rakyat”. Dalam segala kegiatan politik yang dilakukan pemerintah dalam bidang ekonomi diarahkan untuk kemakmuran rakyat.

Dua pembangunan secara nasional ini, terlihat bagi mana demokrasi ekonomi, dimana rakyat memegang peranan penting dalam masalah perekonomian. Namun, walaupun Hatta hanya mengemukakan secara gamblang dua cara tersebut mengenai pembangunan ekonomi nasional, bukan berarti menafikan pembangunan ekonomi nasional yang lain dengan yang dirintis oleh perseorangan. Dalam pemikirannya mengenai hal ini, Hatta juga mempersilahkan usaha-usaha pribadi seperti firma, perusahaan besar PT dan CV untuk turut serta dalam mengisi pembangunan nasional.¹⁵⁸ Pengakuan Hatta terhadap usaha pribadi ini menunjukkan Hatta tidak hanya mementingkan kolektivisme tetapi juga

¹⁵⁸ Ibid., 103.

Koperasi sebagai wadah organisasi ekonomi kerakyatan dan rakyat mempunyai kedudukan politik yang cukup kuat, karena memiliki landasan dasar konstitusional, yaitu bersandar pada pasal 33 UUD 95 khususnya ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dalam ayat ini dikatakan bahwa bangun usaha yang paling sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dengan asas kekeluargaan adalah koperasi. Tafsiran tersebut sering dikemukakan oleh Bung Hatta, yang disebut sebagai Bapak Koperasi dan Ekonomi Kerakyatan Indonesia.

Penjelasan konstitusional tersebut juga dikatakan, bahwa sistem ekonomi Indonesia disandarkan pada asas demokrasi ekonomi, dimana produksi dilakukan oleh semua dan untuk semua yang wujudnya dapat ditafsirkan sebagai koperasi. Dalam wacana sistem ekonomi dunia, koperasi disebut juga sebagai “The Third Way” atau “jalan ketiga”, oleh sosiolog Inggris Anthony Giddens, istilah tersebut akhir-akhir ini dikenal sebagai “jalan tengah antara Kapitalisme dan Sosialisme”.¹⁶⁰

¹⁶⁰ Ibid., 329.

Terinspirasi di atas Bung Hatta berpendapat, bahwa koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya, mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya. Inilah yang ditujukan pada Koperasi dengan didahulukan kepentingan bersama, bukan kepentingan satu pihak.

Koperasi yang dikenal sebagai suatu perkumpulan orang yang biasanya memiliki kemampuan ekonomi terbatas, melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.¹⁶²

Berdasarkan kutipan tersebut sudah cukup terlihat bahwa didalam koperasi setidaknya-tidaknya terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu

¹⁶¹ Sritua Arief, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia (Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia)* 103.

¹⁶² Ibid., 103.

sama lain. Unsur utama adalah unsur ekonomi, sedangkan unsur kedua adalah unsur sosial.

Sebagai suatu bentuk wadah organisasi ekonomi kerakyatan, maka koperasi sudah semestinya harus berusaha memenuhi kebutuhan anggotanya dengan tanpa menjadikan keuntungan sebagai titik tolak usahanya.

Bung Hatta kembali mengatakan, bahwa sandaran koperasi adalah orang, bukan uang, sebab koperasi merupakan kumpulan manusia sedang uang merupakan faktor kedua.¹⁶³ Bila kemudian akhirnya ia banyak menganjurkan koperasi alasan baginya adalah karena koperasi merupakan salah satu upaya praktis sebagai bentuk unit ekonomi kerakyatan dan rakyat yang sedang berkembang dan banyak dicoba di Eropa pada paruh pertama abad 20.

Maka sebagai upaya untuk mengubah bentuk dialektik hubungan ekonomi warisan kolonial belanda di Indonesia, apa yang telah direnungkan dan dipikirkan Bung Hatta, sebagai mana yang telah disinggung pada bagian bab terdahulu tulisan ini. Mengandung pengertian perlunya secara mutlak melaksanakan suatu proses restrukturisasi penguasaan sumber-sumber ekonomi nasional yang terkait dengan restrukturisasi ekonomi secara keseluruhan. Hal ini tercermin dalam pengertian nasionalisme ekonomi sebagai salah satu komponen yang

¹⁶³ Arti ini menjelaskan bahwa relevansi gagasan ekonomi kerakyatan Bung Hatta rupanya bukan soal pilihan antara kapitalisme dan sosialisme, melainkan soal mengembalikan proses dan sumberdaya ekonomi kepada rakyat. B. Henry Priyono, *Rakyat dalam Pusaran Globalisasi, dalam Jacob Oetama, (ed), Bung Hatta* (Jakarta : Buku Kompas, 2003) 5.

1. Diverifikasi produksi untuk menghilangkan ketergantungan atas ekspor bahan-bahan mentah primer.
2. Perkembangan ekonomi untuk tujuan kemakmuran yang merata.
3. Pengalihan dominasi perusahaan usaha-usaha ekonomi dari tangan asing dan golongan cina ketangan pribumi indonesia.¹⁶⁵

Untuk itu perubahan besar kearah ekonomi menuntut keberanian semua pihak, terutama pemerintah. Upaya dalam melakukan perubahan paradigma dari orientasi pertumbuhan “at all cost” menghasilkan proses konglomerasi dan ketimpangan sosial ekonomi yang sangat buruk disertai distorsi ekonomi besar besaran kepada orientasi pemberdayaan ekonomi rakyat harus dihindari.¹⁶⁶

Mengembangkan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui koperasi sebagai wadahnya sama dengan mewujudkan dan membina kelangsungan serta perkembangan demokrasi ekonomi di Indonesia. Bung Hatta kembali

¹⁶⁶ Muhammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, dalam Sri Edi Swasono (ed), *Koperasi didalam Orde Ekonomi, Mencari Bentuk, Posisi dan Realita* (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1995) iii.

Oleh karena itu, salah satu sisa kolonialisme yang menghambat kemajuan, yang mesti disapu selekas-lekasnya ialah inferioritas complex (Rasa Diri Rendah). Maka Bung Hatta sebagai orang yang demokrat selalu mengingatkan bahwa kemerdekaan dapat dicapai melalui mobilisasi ekonomi rakyat, khususnya melalui koperasi dengan asas perjuangan yang dijunjung tinggi dari kultur bangsa Indonesia, agama dan dari ilmu yang dikajinya.

a. Menaikan daya beli dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi rakyat.

Tujuan politik perekonomian dalam pandangan Hatta ialah menaikkan tenaga beli rakyat secara berangsur-angsur.¹⁶⁸ Karena menurut Hatta rakyat tidak akan pernah terlepas dari kesengsaraan hidup, apabila tenaga beli riil-nya tidak bertambah berkembang ekonomi suatu negara akan tetap bertahan, kalau rakyat didalamnya tetap miskin, oleh karena itu rencana pembangunan harus didasarkan atas kenaikan tenaga beli yang meningkat.¹⁶⁹

¹⁶⁹ Muhammad Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, 34.

Selanjutnya dalam menyelenggarakan kemakmuran, Hatta berpendapat Harus menyelenggarakan lebih dulu kepentingan rakyat yang penting, yaitu makanan, pakaian, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Menurutnya kepentingan yang lima ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan esensial bagi kehidupan manusia dan bangsa yang beradap dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, Hatta menghendaki asas *self-supporting* atau “menolong diri sendiri”, walaupun ia menyadari bahwa proses menuju “menolong diri sendiri” ia memerlukan waktu yang lama dan cukup panjang dan tentu pada awalnya juga memerlukan bantuan luar negeri.¹⁷¹

Dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat yang pertama yaitu, menyempurnakan makanan rakyat, hal itu dilakukan dengan cara mencocokkan upah bagi rakyat dengan keperluan hidup yang lebih atas dari dasar minuman.¹⁷²

Hatta berpendapat dalam menentukan upah minimum sehari ditentukan sama dengan harga 5 kilo beras. Itu baru upah minimum, dan

¹⁷² Muhammad Hatta, *Demokras Kita, Bebas Aktif*, 12.

Lalu politik ekonomi baik itu yang sifatnya jangka pendek ataupun jangka panjang mengenai perumahan rakyat harus diadakan di seluruh Indonesia. Hatta juga menyadari dalam usaha memperbarui tempat kediaman bagi seluruh rakyat adalah usaha yang sangat berat dan tidak sedikit ongkosnya serta juga memakan waktu yang lama. Untuk modal awalnya Hatta menganjurkan negara mendirikan ditiap-tiap keresidenan suatu bank industri rumah, yang mana bank ini memberi uang muka, yang dapat diangsur sedikit demi sedikit oleh rakyat yang tertolong dengan rumah baru tersebut.¹⁷⁴

Mengenai masalah perumahan ini, Hatta secara implisit juga menyatakan bahwa antara perumahan yang layak dan kesehatan merupakan suatu hal yang berkaitan.¹⁷⁵ Oleh karenanya setiap tahun hendaklah dibangun rumah-rumah baru untuk menampung rakyat yang bertambah dan gubuk-gubuk yang lebih merupakan kandang sapi harus

¹⁷⁵ Muhammad Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, 33.

Selain itu yang terakhir dalam memenuhi kebutuhan dasar ialah memajukan pendidikan secepat mungkin. Bukan saja memper banyak sekolah untuk menambah kecerdasan rakyat, akan tetapi juga mementingkan pendidikan koperasi yang menjadi tiang perekonomian indonesia di masa datang.¹⁷⁸ Hatta juga memandang pendidikan merupakan suatu hal yang penting, karena untuk membangun (negara ini) perlu dididik lebih dahulu tenaga-tenaga ahli baik secara kualitatif maupun kuantitatif.¹⁷⁹

Dalam memandang politik perekonomian. Hatta menaruh perhatian yang sangat besar kepada masalah distribusi. Distribusi adalah sambungan dari pada produksi untuk menyampaikan yang dihasilkan kepada sipemakai atau konsumen, oleh karena itu pembangunan ekonomi yang bersifat infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan dan lain-lainnya dalam pandangan Hatta adalah pembangunan yang sifatnya tidak bisa dielakan,¹⁸⁰ dan perlu dilaksanakan dengan teratur oleh pemerintah pusat

¹⁸⁰ Muhammad Hatta, *Demokrasi Kita, Bebas Aktif*, 113-114.

Pembangunan ini yang menghendaki pembaruan alat-alat yang begitu banyak, yang ongkosnya tidak sedikit, mungkin juga tidak dapat di biyai dengan modal dari negara, dan mungkin juga harus dilaksanakan dengan modal pinjaman luar negeri yang berjangka panjang, berpuluh tahun lamanya. Namun dengan administrasi dan organisasi yang baik dan efisien, Hatta meyakini tujuan tersebut dapat dicapai.¹⁸²

c. Penguasaan Cabang-cabang Produksi oleh Negara yang Menyangkut Hidup Orang Banyak.

Hatta menyatakan bahwa air, listrik, gas, atau bahan bakar minyak lainnya harus cukup bagi rakyat dan murah harganya. Rakyat tidak dapat dikatakan bahagia apabila menderita kekurangan dan hal tersebut.¹⁸³ Oleh karena itu dalam menilai masalah ini, negara harus menerapkan program ekonomi nasional, dengan cara mengambil alih dan menguasai cabang, cabang produksi seperti bahan tambang, pelabuhan, pos, listrik dan lain-lain. Demi kemakmuran rakyat.

Ekonomi nasional yang dipraktikan disini, bukan berarti negara harus mengganti bangsa asing tersebut dengan bangsa Indonesia karena menurutnya ekonomi nasional berarti membangun ekonomi Indonesia untuk kepentingan bangsa Indonesia. Karena dalam pendapat Hatta, tidak ada bedanya antara kapitalis asing diganti kapitalis Indonesia. Karena

¹⁸¹Muhammad Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, 47.

¹⁸²Ibid., 56.

¹⁸³Muhammad Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, 32.

Lalu dalam penerapan ekonomi nasional tersebut, apabila bangsa ini tidak mempunyai orang-orang yang ahli untuk menjalankan perusahaan tersebut, perusahaan negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak maksudnya, hal ini bisa dijalankan dengan mendatangkan ahli-ahli dari luar negeri, kalau perlu dengan bayaran yang mahal dan pantas, tetapi dengan catatan bahwa dengan beberapa waktu kemudian mereka mendidik orang-orang Indonesia supaya bisa menggantikan kemudian. Dalam hal ini, Hatta mencontohkan negara Russia yang menyelenggarakan *plan* 5 tahunnya dengan mendatangkan orang-orang dari amerika dan jerman yang bahkan menggaji ahli-ahli dari bangsa asing sampai 25 kali lipat dari gaji orang-orangnya sendiri.¹⁸⁵

Hatta berpendapat bahwa untuk melaksanakan pembangunan nasional, maka negeri ini harus memperhitungkan bantuan asing sebagai modal pembangunan. Dan dalam keseluruhannya corak bantuan perembangan yang diperlakukan indonesia adalah sebagai berikut:

pertama, bantuan untuk bentuk apa yang sering disebut *human capital*, untuk memperoleh seorang ahli yang berpengalaman dan mahir dalam bekerja. *Kedua*, bantuan modal untuk membiayai proyek-proyek

¹⁸⁵ Ibid., 23.

- Negara yang memberi pinjaman tidak mencapuri politik dalam negeri suatu negara yang meminjam (Indonesia)
- Bunga yang dipinjam tidak boleh dari 3-3,5 % setahun.
- Jangka kredit itu jangka lama. Kalau untuk industri boleh antara sepuluh sampai duapuluh tahun, akan tetapi kredit untuk membangun

[illegible]

6. Pandangan Muhammad Hatta Tentang Kepemilikan

¹⁸⁷ Ibid., 187

“....setiap orang boleh mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Miliknya itu terjamin, tidak boleh dirampas dengan semena-mena. Tetapi jika hak miliknya tidak dipergunakan untuk kepentingan umum sedangkan masyarakat menghendakinya, pemerintah berhak mempergunakannya untuk itu....”¹⁸⁹

Oleh karena itu, jika kita menelusuri kembali sejarah pendirian negara kita, konsep kepemilikan sosial sangat diakui. Dalam konstitusi kita, khususnya Pasal 33 UUD 1945, privatisasi tidak punya tempat di Indonesia. Selain itu keserakahan dan ketamakan, yang merupakan ciri mendasar sistem yang mengejar keuntungan, juga tidak perlu muncul di Bumi Nusantara ini. Pasal 33 UUD 1945 ayat (2) yang berbunyi:

¹⁸⁹ Muhammad Hatta, *Ekonomi Terpimpin* (jakarta : penerbit mutiara, 1979) 58.

Juga tertulis dalam pasal 33 UUD 1945 :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”¹⁹¹

Dengan demikian konsep ekonomi pasal 33 UUD 1945 adalah konsep ekonomi yang membatasi keleluasaan kapital. Memang, dalam derajat tertentu, kepemilikan pribadi dan swasta diakui. Akan tetapi, yang boleh dikuasai oleh swasta hanya pada sektor yang tidak menguasai hajat hidup rakyat. Karena itu kepemilikan swasta itu tidak boleh mendatangkan eksploitasi atau pengisapan.

Bung Hatta menerangkan bahwa bangsa Indonesia sudah sejak lama mengenal sistem kepemilikan bersama. Lebih jelasnya, dalam soal tanah misalnya dikenal dengan istilah kepemilikan komunal atau kepemilikan desa. Dalam proses berproduksipun, kata Bung Hatta, bangsa Indonesia mengenal kolektivisme yang berarti “tolong-menolong” atau “gotong-royong”. Menurut Bung Hatta, model tolong-menolong itu dapat diteruskan hingga pada zaman modern, antara lain dengan mengadakan koperasi-produksi.

¹⁹⁰ Muhammad Hatta, *Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, 224.

¹⁹¹ Ibid., 224.

Penekanan moral dan akhlak dalam pemikiran ekonominya

Penekanan moral dan akhlak dalam pemikiran ekonominya

Penekanan moral dan akhlak dalam pemikiran ekonominya

Tidak hanya penekanan moral dan akhlak, pemikiran Hatta pun syarat dengan nilai-nilai, salah satunya **nilai keadilan**. Dalam nilai keadilan ini. Terlihat benar (apabila kita mengamati pemikirannya), Hatta sangat menggandrungi cita-cita keadilan sosial dalam masalah ekonomi. Hal itu tidak mengherankan, karena lebih dari separuh hidupnya ia melihat dengan mata kepalanya sendiri dan sudah muak dengan kesengsaraan rakyat Indonesia yang tertindas dan perlakuan diskriminasi rasial dan sebutan “*inlander kotor*” yang dilakukan oleh kaum imperialis.¹⁹² Melihat latar belakang tersebut. Agaknya bisa dipahami apabila ajaran sosialisme Karl Marx yang menentang eksploitasi dan penghisapan yang dilakukan kaum kapitalis menjadi inspirasi keadilan sosial Hatta disamping ajaran islam dan demokrasi asli masyarakat Indonesia. Namun, walaupun Hatta menginspirasi Karl Marx, bukan berarti Hatta menerima dengan mentah-mentah ajaran tersebut. Dalam ajaran Karl Marx ini Hatta jelas-jelas menolak dasar materialisme sebagai pegangan hidupnya.¹⁹³

Keadilan sosial yang merupakan tujuan dari demokrasi ekonomi dan menjadi corak berfikir Hatta. Tidaklah berbeda dengan semangat keadilan yang dibawa ekonomi islam. bahkan dalam ekonomi islam, keadilan merupakan salah satu nilai-nilai dasar yang harus dimiliki selain dari

¹⁹³ Muhammad Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, 15.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اْعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Dalam islam, kelompok ekonomi lemah tidak dipandang sebagai sosok manusia pemalas, tidak suka menabung atau berinvestasi, tetapi islam memberikan perhatian dan berpihak kepada mereka yang lemah secara

¹⁹⁵ Al-Qur'an, 5:8.

Mengingat begitu esensialnya masalah keadilan, sehingga nabi sendiri dengan tegas melarang para petani di desa-desa melakukan transaksi bisnis dengan orang-orang kota yang diyakini melakukan tindakan eksploitasi.¹⁹⁷ Dan masalah keadilan inipun di amini oleh ekonomi muslim, Ibnu Khaldun, yang menyatakan keadilan merupakan salah satu syarat utama untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan disamping masyarakat dan pemerintah.¹⁹⁸

Lalu masih mengenai perihal keadilan, konsep yang ditawarkan Hatta
Mengenai penetapan upah minimum yang adil bagi setiap pekerja oleh negara
kurang lebih hampir serupa dengan konsep perlindungan tenaga kerja dalam

¹⁹⁸ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 203.

Adanya keadilan dan pemerataan, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, serta kebebasan merupakan pokok-pokok yang tidak dapat dipisahkan dari sistem kerakyatan yang akan kita adakan. Karena itu, kerakyatan akan dicapai melalui pembangunan seluruh masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya²⁰¹.

Hatta sangat menjunjung tinggi keadilan. Tetapi pandangannya tentang keadilan tidaklah sama dengan yang dimiliki oleh paham ekonomi liberalism-kapitalisme dan sosialisme-marxisme yang sekuler dan bahkan anti tuhan. Berbuat keadilan di dunia dalam pandangan kedua paham tersebut hanya berdimensi keduniaan atau kekinian, sementara menurut Hatta adalah sebagai

²⁰⁰ Dr. Yusuf Qardhawi, Penerjemah Al-Jamid Al-husaini, *Fatwa-fatwa Mutakhir Dr. Yusuf Qardhawi* (Jakarta:Pustaka Hidayah, 1994), 741.

²⁰¹ Prof. Sarbini Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, 85-86.

Menurut Hatta “adil maksudnya supaya tiap-tiap orang dalam masyarakat diperlakukan secara sama oleh Negara dalam segala rupa dan bebas dari tindakan kezaliman”.²⁰³ Jadi konsep keadilan menurut Hatta menuntut kesamaan didepan hukum. Negara tidak boleh membedakan antara orang-seorang dengan lainnya. Negara harus memperlakukan mereka secara sama, termasuk dalam bidang ekonomi, baik produksi, distribusi maupun konsumsi.

Hatta menuntut kita untuk menegakkan keadilan, bahkan sebagai orang yang beragama kita harus bisa menjadikan keadilan itu sebagai budaya dan sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari, karena menurut Hatta “kita dalam segala perbuatan kita, harus bersifat adil, kita harus cinta pada keadilan, dan bersedia pula membela keadilan di dalam dunia ini.”²⁰⁴

²⁰² Mohammad Hatta, *Ilmu dan Agama* (Jakarta:Yayasan idayu, 1983), 12.

²⁰³ Sri-Edi Swasono dan Fauzie Ridjal (eds.), *Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan* (Jakarta: UI Press, 1992), 179.

²⁰⁴ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 174.

Hal ini sangat sesuai dengan pandangan islam tentang keadilan ekonomi sebagai mana dalam Al-Quran disebutkan lebih dari 1000 kali setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Ini berarti prinsip keadilan diterapkan dalam setiap segi kehidupan manusia terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi. Ini berarti posisi keadilan dalam islam menempati posisi yang vital dan fundamental. Allah berfirman tentang keadilan dalam surat an-nahl ayat 90:²⁰⁶

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kabajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang

²⁰⁶ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M. A., *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2009), 5.

uk menegakkan keadilan dalam semua bidang kehidupan manusia dalam bidang ekonomi, tetapi tidak menghendaki adanya kesetaraan atau persamaan sebagai hasil akhir seperti yang terdapat dalam komunisme, karena hal itu jelas bertentangan dengan fitrah manusia. Dengan demikian pandangan Hatta mengenai keadilan sosial dalam ekonomi islam yang sama-sama menjunjung tinggi keadilan.

Selain nilai keadilan, Hatta juga menyisipkan beberapa nilai dalam pemikirannya. Nilai tersebut ialah **nilai-nilai kekeluargaan, solidaritas dan gotong-royong** dalam berekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut dimanifestasikan dalam bentuk koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran koperasinya Hatta pun tidak segan-segan mengaitkan dengan konsep kekeluargaan dalam sebuah persekutuan keluarga.

Menurut pendapat Ibnu Khaldun dalam menegaskan pendapatnya

uk menegakkan keadilan dalam semua bidang kehidupan manusia dalam bidang ekonomi, tetapi tidak menghendaki adanya kesetaraan atau persamaan sebagai hasil akhir seperti yang terdapat dalam komunisme, karena hal itu jelas bertentangan dengan fitrah manusia. Dengan demikian pandangan Hatta mengenai keadilan sosial dalam ekonomi islam yang sama-sama menjunjung tinggi keadilan.

Selain nilai keadilan, Hatta juga menyisipkan beberapa nilai dalam pemikirannya. Nilai tersebut ialah **nilai-nilai kekeluargaan, solidaritas dan gotong-royong** dalam berekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut dimanifestasikan dalam bentuk koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran koperasinya Hatta pun tidak segan-segan mengaitkan dengan konsep kekeluargaan dalam sebuah persekutuan keluarga.

Menurut pendapat Ibnu Khaldun dalam menegaskan pendapatnya

uk menegakkan keadilan dalam semua bidang kehidupan manusia dalam bidang ekonomi, tetapi tidak menghendaki adanya kesetaraan atau persamaan sebagai hasil akhir seperti yang terdapat dalam komunisme, karena hal itu jelas bertentangan dengan fitrah manusia. Dengan demikian pandangan Hatta mengenai keadilan sosial dalam ekonomi islam yang sama-sama menjunjung tinggi keadilan.

Selain nilai keadilan, Hatta juga menyisipkan beberapa nilai dalam pemikirannya. Nilai tersebut ialah **nilai-nilai kekeluargaan, solidaritas dan gotong-royong** dalam berekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut dimanifestasikan dalam bentuk koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran koperasinya Hatta pun tidak segan-segan mengaitkan dengan konsep kekeluargaan dalam sebuah persekutuan keluarga.

Menurut pendapat Ibnu Khaldun dalam menegaskan pendapatnya

solidaritas, setia kawan, dan gotong royong, kerana dengan adanya cita-cita solidaritas, maka kokohlah masyarakat.²⁰⁷

Sebagai mana halnya dengan pemikiran Hatta, ekonomi Islam juga menekankan kerja sama dan gotong-royong, yang mana dalam ekonomi Islam kerjasama dan gotong-royong termasuk kedalam bagian nilai-nilai instrumental ekonomi Islam. dengan gotong-royong dan kerja sama inilah yang pada akhirnya akan menimbulkan kesadaran pada diri orang yang melakukan kerjasama tersebut, bahwa ia tidak akan mampu berbuat banyak apabila dalam hidupnya tidak terdapat oranglain disekelilingnya. Kesadaran inipun menjadi penting dan menjadi benih dalam menumbuhkan semangat tolong-menolong dan persaudaraan terhadap orang saling kerja sama tersebut. Ibnu Khaldun, seorang sarjana ekonomi Islam, juga mengatakan bahwa didalam masyarakat solidaritas sangat diperlukan untuk meningkatkan kerja sama, sehingga dengan solidaritas tersebut akan meningkatkan produktifitas dalam masyarakat itu sendiri.²⁰⁸

Islam sendiri sangat mendorong sekali dengan adanya kerjasama, termasuk dalam bidang ekonomi. Ini terlihat dari ayat yang menyuruh manusia untuk saling tolong-menolong yang terdapat dalam Al-Quran:²⁰⁹

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

²⁰⁷ Muhammad Hatta, *Kumpulan Pidato III* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), 164.

²⁰⁸ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 203.

²⁰⁹ Al-Qur'an, 5:2.

Dalam hal kerjasama baik dalam skala kecil maupun besar, skala nasional maupun internasional, semangat kolektivisme ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta dan ekonomi Islam sama-sama memiliki orientasi untuk saling mengisi dan melengkapi satu sama lain dan merupakan bentuk manifestasi kita sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain dalam memenuhi segala kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan.

Selanjutnya, Hatta mengeluarkan **politik ekonomi** yang dilakukan oleh pemerintah haruslah bertujuan untuk “menaikkan daya beli masyarakat”. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka mau tidak mau segala aktifitas produksi harus digalakkan. Dengan menggalakkan aktifitas produksi tersebut, berarti negara harus menciptakan kesempatan kerja bagi rakyatnya. Dalam menaikkan aktifitas produksi bagi negara, terlihat pemikiran yang dikemukakan Hatta, bahwa ia sangat mementingkan kemajuan sektor riil dan

[illegible]

Dalam pandangan Islam, aktivitas produksi merupakan bagian dari kewajiban *imaratul kaun*, yakni menciptakan kemakmuran semesta untuk semua makhluk.²¹¹ Rasulullah sebagai kepala negara juga menekankan pentingnya aktivitas produksi. Hal itu bisa dibuktikan dengan tindakan Rasulullah kemudian dengan menerapkan kebijakan penyediaan lapangan pekerjaan bagi kaum muhajirin sekaligus peningkatan pendapatan nasional kaum muslimin dengan mengimplementasikan akad *muzara'ah*, *musaqat* dan *mudharabah*. Secara alami, perluasan produksi dan fasilitas perdagangan meningkatkan produksi total kaum muslimin dan menghasilkan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja, lahan dan modal. Selain itu Rasulullah SAW, juga membagikan tanah kepada kaum muhajirin untuk pembangunan pemukiman yang berimplikasi pada peningkatan partisipasi kerja dan aktivitas pembangunan pemukiman di Madinah. Sehingga kesejahteraan umum kaum muslimin mengalami peningkatan.²¹²

Islam menilai kemajuan ekonomi bukan dengan indikator pertumbuhan GNP (Gross National Product), tetapi sejauh mana memberikan peluang-peluang ekonomi yang semakin besar kepada rakyat. Oleh karena itu sektor riil lebih diutamakan dari pada sektor moneter yang hanya menciptakan perputaran uang diantara kelompok tertentu saja. Hal ini sekaligus membuktikan, sasaran ekonomi dalam islam adalah manusia sebagai prioritas

²¹² Ibid., 152.

Ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta adalah pelaksanaan strategi pembangunan berdasarkan pembagian yang merata dan meluas (distribusi) dalam hal kesempatan berusaha. Dengan penyebaran secara luas, baik secara horizontal (meliputi seluruh wilayah), maupun vertikal (daerah perkotaan maupun khususnya pedesaan), investasi-investasi dalam segala usaha yang produktif dan efisien, terciptalah fondasi yang kuat bagi keadilan dan pemerataan.²¹⁴ Dalam hal ini Muhammad Hatta menekankan distribusi pada hal pemberian kesempatan usaha bagi siapa saja yang mau menjalankan tanpa adanya diskriminasi dalam mencapai kemapanan ekonomi, dengan terbukanya kesempatan usaha secara merata, maka pemerataan pendapatan maupun kekayaan juga akan terlaksana agar peningkatan pembangunan mampu terealisasi dan keadilan sosial ekonomi dapat terwujud secara maksimal mulai dari sector kecil dalam hal ini adalah desa sampai kepada sector pusat (kota).

Hal ini senada dengan pandangan ekonomi islam, tujuan keadilan sosioal ekonomi, distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata, secara aklamasi dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari falsafah moral islam

²¹⁴ Prof. Sarbini Sumawinata, *Politik ekonomi Kerakyatan*, 22.

dan didasarkan pada komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan kemanusiaan, sesungguhnya, ada penekanan besar pada keadilan dan persaudaraan dalam Al-Quran dan Assunnah sehingga nyaris tidak terbayang sebuah masyarakat muslim ideal dimana hal-hal ini tidak diaktualisasikan didalamnya. Keduanya secara esensial merupakan dua profil dari satu wajah. Keduanya tidak dapat terealisasi tanpanya distribusi pendapatan dan kekayaan. Karena itulah, sasaran ini terintegrasi kuat kedalam seluruh ajaran islam sehingga realisasinya menjadi suatu komitmen spiritual masyarakat muslim.²¹⁵

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota. Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (QS. Al- Hasyr : 7)

Islam juga mengemukakan tentang pentingnya spesialisasi pekerjaan.

Al- Ghozali, cendikiawan muslim masa klasik, juga mengeluarkan pendapat

²¹⁵ Dr. Umer chapra, *sistem moneter islam* (Jakarta: Gema Insane, 2000), 5.

²¹⁶ Al-Qur'an, 59:7.

²¹⁷ Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 330.

²¹⁸ Dr. Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral*, 195.

²¹⁹ Muhammad Hatta, *Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, 149.

²²⁰ Ibid., 152.

Dalam konteks kenegaraan Pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus menjadikan “kesejahteraan masyarakat” sebagai sebuah keharusan yang wajib terpenuhi melalui kekayaan Negara sebagai sumber utama tercapainya kesejahteraan. Kekayaan Negara, secara aktual merupakan kekayaan umum. Kepala Negara hanya bertindak sebagai pemegang amanah (care taker). merupakan kewajiban bagi Negara untuk mengeluarkannya guna untuk kepentingan public.²²⁴

²²² Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, 13.

²²³ IR. H. ADIWARMAN A. KARIM, SE.,M.B.A., M.A.E.P, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insane, 2001), 177.

²²⁴ Dr. A.A. Islahi, *konsep ekonomi ibnu taimiyah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), 145.

Selanjutnya pemikiran ekonomi yang ditawarkan Hatta yang lain yang cukup menonjol adalah **konsep Demokrasi ekonomi atau kedaulatan rakyat**, Hatta mengajukan konsepsinya tentang “Demokrasi Ekonomi” yang harus mendampingi “Demokrasi Politik”. menurut Hatta, kerakyatan dalam sistem ekonomi mengetengahkan pentingnya pengutamaan kepentingan rakyat, kususnya hajat hidup orang banyak, yang bersumber dari kedaulatan rakyat atau demokrasi ekonomi. Oleh karena itu dalam sistem ekonomi berlaku demokrasi ekonomi yang tidak meng hendaki otokrasi ekonomi, sebagai mana demokrasi ekonomi yang menolak otokrasi politik. ²²⁶

Sangat jelas esensi dari Demokrasi Hatta adalah partisipasi dan emansipasi. Lebih dari itu Hatta pun menegaskan bahwa Demokrasi Indonesia dasarnya adalah paham kebersamaan (kolektivitas). Partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang di gagas Hatta ialah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi adalah etos

²²⁶ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, Viii.

Demokrasi ekonomi yang berkenaan dengan penguasaan masalah cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak oleh negara dan dikelola yang mana keuntungan dari pengelolaan tersebut diperuntukan untuk kemakmuran rakyat seluruhnya. Oleh karena itu, dalam kedaulatan rakyat ini distribusi kekayaan dan barang dalam pandangan Hatta harus merata.

Monzer kahf, Ph. D., *ekonomi islam “Telaah Analitik Terhadap Fungsi sistem Ekonomi Islam”*, 137.

[illegible]

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka." (QS Asy Syura:38).

Ayat diatas salah satunya menjelaskan bahwa menggunakan jalur musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap perkara. Dalam hal kenegaraan yang menjunjung tinggi Demokrasi, didalam menentukan arah kebijakan perekonomian harus berasaskan pada kesepakatan bersama dan menjadikan kepentingan publik sebagai tujuan utama. Hal tersebut sangat sejalan dengan pandangan Hatta yang diamanatkan didalam konstitusi pasal 33 UUD 1945 dimana perekonomian berasaskan atas demokrasi untuk mencapai kemakmuran bagi semua orang. Menolong rakyat yang miskin dan bagi menata ekonomi bangsa secara baik maka menurut Hatta harus ada

²²⁸ KH. Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, 100.

229 Al-Qur'an, 42:38.

Pandangan Hatta tentang **Kepemilikan**, seperti diuraikan ada bagian-bagian sebelumnya, tatkala mengelaborasi falsafah ekonomi Hatta, konsep kepemilikan yang dianut Hatta tidaklah sama dengan konsep kepemilikan dalam paham liberalisme-kapitalisme, maupun sosialisme-komunisme. Menurut Hatta “setiap orang boleh mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Miliknya itu terjamin, tidak boleh dirampas dengan semena-mena. Tetapi jika hak miliknya tidak dipergunakan untuk kepentingan umum sedangkan masyarakat menghendakinya, pemerintah berhak memepergunakannya untuk itu”.²³¹

um sementara masyarakat memerlukannya, maka Negara

jadi maupun kelompok orang atau masyarakat. Kepemilikan ta harus terjamin sehingga tidak boleh dirampas dan atau ng lain tanpa melalui cara dan prosedur yang benar. Teta nikian, jika harta dan kekayaan itu tidak dipergunakannya bagi um sementara masyarakat memerlukannya, maka Negara

²³¹ Muhammadiyah Hatta, *Ekonomi Terpimpin*, 58.

²³⁶ Muhammad Hatta, *Kumpulan Pidato III*, 171-172.

Pandangan Hatta tentang “ Bumi, langit, pendek kata, alam seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Tidak sebagianpun dari semuanya itu ada kepunyaan manusia. Allah lah yang punya, bukan milik manusia. Manusia lahir kedunia dengan tidak memiliki apa-apa, berpakaianpun tidak”.²³⁸ pandangan ini jelas sangat sejalan dengan ajaran Islam seperti yang terdapat dalam Al-Quran:²³⁹

Artinya: Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu. (Ali Imran ayat 189)

Dalam pandangan Hatta sebagai peletak dasar konstitusi pasal 33 UUD 1945 yang berintikan bahwa segala cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dikuasai dan dikelola oleh negara. Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Bahwa segala kekayaan alam yang ada di jagat raya ini pada hakikatnya adalah milik Allah, manusia bukanlah pemilik hakiki dari alam ini, akan tatapi manusia hanya mempunyai hak pakai dan hak kelola. Atas dasar inilah ekonomi islam tidak membenarkan adanya praktik monopoli. Dan merupakan landasan awal dalam hak negara untuk mengelola cabang

²³⁸ Ibid., 134.

²⁴⁰ Ibid., 134-135.

C. Relevansi Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta Dengan Tantangan Ekonomi Indonesia Saat Ini

[illegible]

estasi serta privatisasi oleh pihak swasta yang didukung pemerintah elite di Indonesia benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap masa depan ekonomi Indonesia yang membangun sebuah konstelasi ekonomi dengan mengikuti model ekonomi kapitalis negara-negara maju. Sehingga sistem ekonomi Indonesia yang merupakan basis ideologi dalam pembangunan ekonomi Indonesia kehilangan ruhanya. Konklusi ekonomi Indonesia yang mencita-citakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat tidak mampu terealisasi secara riil. Resesi ekonomi menjadi masalah akut yang tidak dapat dielakkan lagi. Globalisasi ekonomi yang merupakan manifestasi dari liberalisasi ditangkal dengan merevitalisasi penerapan sistem ekonomi

estasi serta privatisasi oleh pihak swasta yang didukung pemerintah elite di Indonesia benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap masa depan ekonomi Indonesia yang membangun sebuah konstelasi ekonomi dengan mengikuti model ekonomi kapitalis negara-negara maju. Sehingga sistem ekonomi Indonesia yang merupakan basis ideologi dalam pembangunan ekonomi Indonesia kehilangan ruhanya. Konklusi ekonomi Indonesia yang mencita-citakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat tidak mampu terealisasi secara riil. Resesi ekonomi menjadi masalah akut yang tidak dapat dielakkan lagi. Globalisasi ekonomi yang merupakan manifestasi dari liberalisasi ditangkal dengan merevitalisasi penerapan sistem ekonomi

estasi serta privatisasi oleh pihak swasta yang didukung pemerintah elite di Indonesia benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap masa depan ekonomi Indonesia yang membangun sebuah konstelasi ekonomi dengan mengikuti model ekonomi kapitalis negara-negara maju. Sehingga sistem ekonomi Indonesia yang merupakan basis ideologi dalam pembangunan ekonomi Indonesia kehilangan ruhanya. Konklusi ekonomi Indonesia yang mencita-citakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat tidak mampu terealisasi secara riil. Resesi ekonomi menjadi masalah akut yang tidak dapat dielakkan lagi. Globalisasi ekonomi yang merupakan manifestasi dari liberalisasi ditangkal dengan merevitalisasi penerapan sistem ekonomi

kebijakan pemerintah dengan memberikan ruang gerak yang begitu leluasa terhadap swasta (investor asing) untuk mendominasi pengelolaan kekayaan alam Indonesia merupakan salah satu cerminan bahwa aparaturnegara kita mencetuskan kebijakan politik ekonomi yang bertentangan dengan UUD 45. Dalam pasal 33 UUD 45 secara umum menjelaskan bahwa

[illegible]

cabang produksi yang fundamental yang dimaksud ialah kekayaan alam (minyak bumi, air dll) merupakan hal yang harus dikuasai dan dikelola penuh oleh negara. Namun dalam praktiknya pengelolaan tidak hanya dilakukan oleh negara namun dalam bentuk kerjasama antara Negara dengan swasta sebagai upaya pengembangan mutu pengelolaan sumberdaya alam. Hal ini tidak menjadi masalah jika pemerintah sebagai aparatur negara tetap memegang teguh pada tugasnya dalam mensejahterakan rakyat artinya pemerintah mampu memproteksi hak-hak rakyat dengan tidak memberikan ruang dominasi pengelolaan sumberdaya alam kepada pihak swasta agar hasilnya benar-benar menguntungkan negara serta dapat dirasakan oleh rakyat secara merata. Akan tetapi hal ini menjadi sangat miris tatkala realita berbicara lain, pemerintah hanya menjadi boneka dari para penguasa-penguasa *corporasi* yang bersifat kapitalistik yang mencoba untuk mengeksploitasi kekayaan bangsa dengan menghancurkan tatanan *Good governance*. Sehingga Pemerintah mengalami disfungsi dan berevolusi mejadi alat kepanjangan tangan kaum imperialis ekonomi yang selalu melancarkan aksinya dalam melakukan penindasan ekonomi terhadap bangsa ini. Hasilnya dalam proses

[illegible]

Angkan ekonomi kerakyatan lebih memihak masyarakat perhana. Kalau neoliberalisme berpretensi mengejar efisiensi, mengabaikan moralitas, sedangkan ekonomi kerakyatan memberdayakan masyarakat secara utuh. Ekonomi Pancasila melembagakan keadilan sosial, sedangkan ekonomi neoliberalisme melembagakan kapitalisme. Dalam sistem operasionalnya selama ini, sudah terlihat selaras dengan bahwa pasar sarat dengan berbagai ketidakadilan yang tidak mendukung kepentingan ekonomi masyarakat, cita-cita pembangunan keadilan sosial. Mekanisme pasar bebas yang tidak ada monitoring dan kontrol adanya regulasi dalam hal kegiatan ekonomi pasar banyak menimbulkan kegagalan, terutama dalam menjaga kepentingan mereka yang lemah. Ini semua terjadi karena praktik neoliberalisme yang gesekan.

Cengkraman neoliberalisme terpancar pada gencarnya privatisasi dan liberalisasi ekonomi. Mantra neoliberal menempatkan investasi dan investor di atas segalanya. Setiap kebijakan ekonomi harus tunduk pada sistem, mekanisme, dan hukum pasar. Dan, tanpa mengikuti dogma itu, kemakmuran mustahil didapat.²⁴³

Di dalam proyeksi neoliberal musuh terbesar utama pemerintah. Oleh karenanya para pengkonstatir neoliberal me-
ngabsenkan peran dan intervensi negara dalam kegiatan pe-
u dengan cara lain mereka mencoba memanfaatkan pemerin-
reka untuk menciptakan produk hukum untuk melegalkan keg-
reka. Negara maju pada umumnya memberikan hutang luar n-
ara berkembang sebagai alat pengikat yang sarat akan kepenti-
uk jangka panjang yaitu imperialisme ekonomi dan ekspansi
reka. Neoliberal yang berkembang di indonesia benar-benar
dern yang mencoba membuka ekonomi pasar secara bebas t

²⁴³ Benhard Limbong, *Ekonomi Kerakyatan Dan Nasionalisme Ekonomi*, 318.

liberalisasi, serta deregulasi yang tidak mencerminkan identitas sistem ekonomi yang di anut oleh negara kita “Ekonomi Kerakyatan”.

Semua mekanisme Globalisasi didasarkan dan di praktikan melalui kebijakan neoliberalisme. Mereka percaya bahwa pertumbuhan dicapai sebagai hasil normal “kompetisi bebas” dan “ pasar bebas” itu efisien, dan itulah cara yang tepat untuk mengalokasikan sumberdaya alam yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Neoliberal mengatakan bahwa pasar bebas akan menjamin pangan murah sehingga keamanan pangan terjamin. Tetapi kenyataannya berlaku sebaliknya, perdagangan bebas justru malah menaikkan harga pangan.²⁴⁴

Banyak masyarakat pinggiran mengalami kelaparan karena tidak mampu membeli bahan pokok akibat naiknya harga yang melampaui tingkat pendapatan mereka. Berlakunya praktik pasar bebas oleh neoliberalisme memberikan pengaruh pada sikap kompetitif yang melupakan etika dan moralitas yang juga menjadi syarat penting dalam melakukan kegiatan ekonomi dalam sekup apapun. Dari kebijakan ini melahirkan sikap dasar kapitalisme *survival of the fittest* (yang kuat dia yang bertahan), tidak peduli orang lain, masalah yang pokok adalah kepentingan sendiri dan orang bebas sepenuhnya untuk mencapai tingkat semaksimal mungkin. Kapitalisme tidak memperdulikan adanya ketidakadilan dan kemiskinan. Sifat dasar kapitalisme adalah eksklusif, yaitu hanya yang kuat berhak hidup, sedangkan yang lemah,

²⁴⁴ Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Kapitalisme, Negara Dan Masyarakat*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), 281.

Sejak kebijakan neoliberal diimplementasikan, kebijakan tersebut telah menuai banyak korban khususnya kaum miskin. Terdapat beberapa dampak negatif akibat perubahan kebijakan kearah pasar bebas. Pertama, ia menyingkirkan peran negara dan masyarakat dari subyek sentral proses ekonomi dan produksi. Kita ingat, di masa lampau negara memiliki peran sentral dalam ekonomi. Salah satu dampaknya, rakyat khususnya kaum miskin tidak punya pilihan lain selain menyerahkan sumber ekonomi mereka. Rakyat terpaksa menjual tanah mereka. Neoliberalisme juga mereduksi peran tradisional petani miskin sebagai produsen pangan dengan membuka investasi bidang pangan bagi perusahaan agribisnis global yang akan menghancurkan kehidupan petani. Sebaliknya, investasi dan produksi pasar bebas dibidang pangan hanya akan menguntungkan perusahaan agribisnis global. Mereka mengubah strategi dari kontrol langsung atas tanah menjadi kontrol atas proses produksi melalui petani independen yang eksklusif atau ikatan kontrak seperti konsep *corporate farming* yang telah dikenalkan di indonesia.

erti konsep *corporate farming* yang telah dikenalkan di indone

²⁴⁵ Sarbini Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 224.

Fenomena Globalisasi yang jelas-jelas lebih merugikan negara-negara berkembang yang justru menjadi semakin miskin. Mengapa demikian? Sebabnya adalah bahwa globalisasi tidak lain merupakan pemecahan kejenuhan pasar negara-negara maju dan mencari tempat-tempat penjualan atau “pembuangan” barang-barang yang sudah mengalami kesulitan di pasar dalam negeri negara-negara industri maju.

[illegible]

upakan solusi terbaik dalam menangani berbagai persoalan
ab, pancasila menempati posisi paling sentral dalam keber
gsa indonesia. Ia dasar negara, idiologi dan falsafah bangsa,
ala sumber hukum. Karena itu, revitalisasi Pancasila ha
gram negara seperti yang di kampanyekan secara gencar
casila (bersama UUD 45, NKRI, Bineka tunggal ika, sang
h) adalah harga mati. Penghianatan terhadap panca
ghianatan terhadap negara bangsa Indonesia. Dengan Panca
nesia bisa terangkat dari keterpurukan, kemiskinan, ketida
ghadapi dominasi asing. Sebaliknya, tanpa pancasila, NKRI a
gerak tanpa arah dan pada gilirannya akan terjerembab ke
al, dan bukan mustahil suatu hari akan terpecah berkeping-ke

Sebagai mana telah dijelaskan sebelumnya, ekonomi kerakyatan adalah suatu tata ekonomi yang di jiwai idiologi pancasila, suatu tata ekonomi nasional yang merupakan usaha bersama dan berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan dibawah pimpinan pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi anggota-anggota masyarakat/rakyat. Resesi dan depresi ekonomi dunia akibat paham kapitalisme ataupun sosialisme sabagai *grand idiology* dirasa sudah tidak mampu menjawab persoalan-persoalan ekonomi dan sudah tidak bisa memeberikan solusi yang komprehensif dalam mengentaskan permasalahan ekonomi yang begitu kompleks.

[illegible]

Ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonomi pembangunan bangsa Indonesia yang berkeadilan sosial merupakan masalah yang sudah lama menjadi perhatian para pemikir, khususnya filosof. Bangsa Indonesia mencantumkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai tujuan akhir yang digambarkan sebagai masyarakat yang adil dan makmur, yang *gemah-riпах karta raharja*, masyarakat yang adil dan makmur, karena merupakan wujud akhir dari masyarakat bangsa yang di tuju, jelas dimaksudkan sebagai masyarakat yang mengandung sifat, sifat keadilan dan kemakmuran yang lengkap, yang mencakup keadilan hukum, ekonomi, politik, sosial-budaya, dan moral.²⁴⁶

²⁴⁶ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinan*, 206.

